

## Bab V

### Kesimpulan

Jumlah pengungsi Suriah yang amat banyak di Lebanon dan kondisi Lebanon yang bukan merupakan negara peratifikasi atau negara anggota UNHCR merupakan permasalahan yang dilihat dalam penelitian ini. Dimana unit analisis yakni UNHCR sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat khusus dalam penanganan pengungsi memiliki peranan yang sangat vital dalam upaya penanganan pengungsi asal Suriah di Lebanon. Namun Lebanon yang merupakan bukan negara anggota UNHCR menjadi menarik untuk melihat bagaimana peranan UNHCR di negara bukan peratifikasi konvensi 1951 namun menampung banyak pengungsi. Kerangka konseptual *international governmental organization (IGO)* menjadi pisau analisa yang peneliti gunakan untuk melihat peranan UNHCR dalam menangani pengungsi asal Suriah di Lebanon.

Kehadiran pengungsi asal Suriah yang sangat banyak di Lebanon membutuhkan peran aktif dari UNHCR guna melindungi dan mencari solusi terhadap permasalahan pengungsi di Lebanon. UNHCR merupakan organisasi internasional yang memiliki mandate khusus dalam menangani permasalahan pengungsi yang didirikan pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum PBB. Mandat khusus tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan dan bantuan serta mencari solusi jangka panjang terhadap permasalahan pengungsi internasional. Upaya-upaya yang dilakukan UNHCR dalam menangani pengungsi asal Suriah di

Lebanon mencakup pada peran organisasi internasional yakni inisiator, fasilitator, mediator/rekonsiliator dan determinator.

Sebagai inisiator, UNHCR melakukan peranan dengan memprakarsai berbagai kerja sama untuk menangani permasalahan pengungsi. Kerja sama dalam penanganan pengungsi pertama kali di Lebanon dimulai melalui MoU kerja sama antara pemerintah Lebanon dan UNHCR pada tahun 2003 pasca masuknya pengungsi asal palestina ke negara ini. Sedangkan dalam penanganan pengungsi asal Suriah di Lebanon, UNHCR melakukan peranan sebagai inisiator melalui dibentuknya komite tripartit antara Kementerian Sosial Lebanon, UNHCR dan High Commission Relief Lebanon (NGO lokal Lebanon). Tiga lembaga inilah yang menjadi koordinator utama dalam penanganan pengungsi asal Suriah di Lebanon. Selain itu, UNHCR juga memprakarsai kerja sama dengan berbagai komunitas internasional guna membantu penanganan permasalahan pengungsi asal Suriah di Lebanon, mulai dari kerja sama dengan negara anggota UNHCR serta berbagai lembaga, NGO dan yayasan guna ikut serta menyelesaikan permasalahan pengungsi asal Suriah di Lebanon.

Sedangkan dalam peranannya sebagai fasilitator, UNHCR memberikan berbagai fasilitas guna membantu penanganan pengungsi asal Suriah di Lebanon. Secara garis besar, UNHCR memfasilitasi sembilan bantuan untuk melindungi dan menunjang kehidupan pengungsi asal Suriah di Lebanon. Bantuan tersebut meliputi perlindungan, keamanan pangan, bantuan dasar, *shelter*, kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih, stabilitas sosial dan mata pencaharian.

Dalam peranannya sebagai determinator, UNHCR melakukan peranan dengan melakukan penetapan status pengungsi dan penentuan solusi jangka panjang dalam menangani permasalahan pengungsi asal Suriah di Lebanon. Penetapan status pengungsi disebut dengan *Refugees Status Determination (RSD)*. RSD dimulai dengan dilakukannya registrasi oleh pengungsi kepada UNHCR. Kemudian UNHCR akan memeriksa kelengkapan data, kemudian melakukan verifikasi terhadap data-data tersebut. Setelah verifikasi data dilakukan, UNHCR akan melakukan wawancara terhadap para pengungsi agar pengungsi yang nantinya terdaftar tidak merupakan orang-orang yang dilarang oleh UNHCR. Selain itu, melalui wawancara UNHCR juga mengumpulkan informasi mengenai daerah asal mereka, serta keadaan pengungsi lainnya. Setelah wawancara dilakukan, barulah status pengungsi bisa diperoleh. Setelah memperoleh status pengungsi dari UNHCR, barulah kemudian UNHCR bisa memberikan bantuan solusi jangka panjang terhadap para pengungsi. Solusi jangka panjang tersebut dibagi atas tiga, yaitu pemulangan ke negara asal secara sukarela, integrasi lokal serta penempatan di negara ketiga.

Dalam peran sebagai mediator, UNHCR tidak memberikan dampak. Hal ini karena UNHCR tidak dapat ikut campur dalam upaya menghentikan konflik yang terjadi di Suriah. Sedangkan konflik antara penduduk Lebanon dan pengungsi asal Suriah juga tidak terlalu sering terjadi. Meskipun terjadi, hal tersebut diselesaikan berdasarkan hukum di Lebanon sedangkan UNHCR hanya bisa memberikan bantuan advokasi pada pengungsi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara UNHCR dan Pemerintah Lebanon serta aturan dalam Konvensi 1951, dimana pengungsi harus

mematuhi aturan hukum yang berlaku di Lebanon dan menjalani proses hukum sesuai undang-undang Lebanon apabila terjadi pelanggaran.

Peneliti menilai bahwa UNHCR dalam penanganan pengungsi asal Suriah di Lebanon telah melakukan peranannya sesuai konsep peran organisasi internasional selain peran sebagai mediator/rekonsiliator. Hal ini karena UNHCR tidak memiliki mandat untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Suriah.

